

Lihat Pergub DKI Jakarta No. 122/2020 Halaman 9 -
Formulir Konteks Manajemen Risiko

Konteks Manajemen Risiko

Unit Organisasi : Kecamatan Kelapa Gading
Periode Penerapan : Januari – Desember 2022
Lingkup Penerapan : Tugas dan Fungsi Kecamatan (Pergub 152 tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi

- a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan
- c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- d. Mengoordinasikan upaya penyelenggara ketertarikan dan ketertiban umum
- e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh UKPD yang ada di Kecamatan
- i. Mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kecamatan
- j. Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan PD, UKPD dan/atau instansi pemerintah pusat/swasta terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan

1. Sasaran Organisasi

1. NO.	SASARAN ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya kepuasan pengelolaan Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi	Persentase capaian penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan kota di Kota Administrasi Jakarta Utara	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
3.	Meningkatnya Kepuasan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
4.	Meningkatnya kepuasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks kepuasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
5.	Meningkatnya Kepuasan masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Utara	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Utara
6.	Meningkatnya kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pelimpahan Desa	Indeks Kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Dst

2. Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Resiko

Pemilik Resiko : Camat
Koordinator Resiko : Sekretaris Kecamatan
Manajer Resiko : Kasubag. Program dan Anggaran

3. Daftar Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

No.	Stakeholder	Hubungan
1.	Biro Pemerintahan	Koordinator Bidang Pemerintahan
2.	BAGIAN PEMERINTAHAN SETKO ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	Koordinator Urusan Bidang Pemerintahan di Wilayah Jakarta Utara
3.	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	Koordinator Urusan Kepegawaian di Wilayah Jakarta Utara
4.	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN & PELAYANAN PUBLIK KOTA ADM. JAKARTA UTARA	Koordinator Urusan Kepegawaian, Ketatalaksanaan & Pelayanan Publik pada Sekretariat Kota, Kecamatan & Kelurahan di Wilayah Jakarta Utara
5.	PUSKESMAS KECAMATAN KELAPA GADING	Koordinator Urusan Kesehatan di Wilayah Kecamatan Kelapa Gading
6.	UP.PMPTSP KECAMATAN KELAPA GADING	Koordinator dalam Bidang Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Kelapa Gading
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN	Koordinator Bidang Ketentraman & Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Kelapa Gading
8.	SATUAN PELAKSANA DINAS PADA KECAMATAN KELAPA GADING	Koordinator Lintas Sektoral pada masing-masing Dinas yang membidangnya
8.	INSPEKTORAT	Pembina dan Pengawas

dst

4. Daftar Peraturan Perundang-Undangan yang terkait
- | No | PERATURAN TERKAIT | AMANAT PERATURAN YANG TERKAIT UNIT |
|----|--|---|
| 1. | Tahun 2010
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 | Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah |
| 2. | Tahun 2018
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 | Tugas dan Fungsi Kecamatan
Penerapan Manajemen Resiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
| 3. | Tahun 2020
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 153 | Struktur Manajemen Resiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
| 4. | Tahun 2021
SK Camat Kecamatan Kelapa Gading Nomor 89 Tahun 2021 | Penetapan Standar Pelayanan pada Kecamatan Kelapa Gading Tahun 2021 |

5. Kriteria Resiko

A. Kriteria Kemungkinan

Level Kemungkinan	Persentase Kemungkinan Terjadinya Dalam 1 Periode	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya Dalam 1 Periode
1 Hampir Tidak Terjadi	$x < 5 \%$	Sangat Jarang : < 2kali dalam 1 tahun
2 Jarang Terjadi	$5 \% < x < 10 \%$	Jarang : 2kali s/d 5 kali dalam 1 tahun
3 Kadang-kadang Terjadi	$10 \% < x < 20 \%$	Cukupsering : 6 s.d 9kalidalam 1 tahun
4 Sering Terjadi	$20 \% < x , 50 \%$	Sering : 10 kali s.d12kali dalam 1 tahun
5 Hampir Pasti Terjadi	$x > 50 \%$	Sangat Sering : >12kali dalam 1 tahun

B Kriteria Dampak

Level Dampak		Area Dampak						
		1. Beban Keuangan Daerah		2. Penurunan Reputasi	3. Sanksi Pidana, Perdata, dan/atau Administratif	4. Kecelakaan Kerja	5. Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	6. Penurunan Kinerja
		Froud	Non Froud					
1	Tidak Signifikan		$x < 0,01$ permil	- Jumlah keluhan secara langsung /lisan (dapat di dokumentasikan)/tertulis ke organisasi <10 - Jumlah kepercayaan stakeholder/investor sangat baik - Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4,25 < x < 5$ (skala 5)		Ancaman spikis	$x < 5 \%$ dari jam operasional layanan harian	$x > 95 \%$
2	Minor		$0,01$ permil < $x < 0,1$ permil	- Jumlah keluhan secara langsung /lisa (dapat di dokumentasikan)/tertulis ke organisasi >10 - Jumlah kepercayaan stakeholder/investor baik - Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4,25 < x < 4,5$ (skala 5)		Cidera fisik dan mental ringan	$5 \% < x < 15 \%$ dari jam operasional layanan harian	$90 \% < x < 95 \%$
3	Moderat		$0,1$ permil < x	- Pemberitaan negatif di media sosial	Administratif tergugat adalah pejabat eselon	Cidera fisik dan mental	$15 \% < x < 25 \%$ dari jam operasional	$80 \% < x < 90 \%$

			< 1 permil	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberitaan negatif di media massa lokal - Tingkat kepercayaan stakeholder/investor sedang - Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4 < x < 4,25$ (skala 5) 	III ke bawah, atau pejabat yang setara	sedang	harian	
4	Signifikan	Rp 1 Juta < x < Rp 1 M	1 permil < x < 10 permil	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional - Tingkat kepercayaan stakeholder/investor rendah - Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,25 < x < 4$ (skala 5) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana < 5 tahun - Perdata < 100 M - Administrasi tergugat adalah pejabat eselon III, atau pejabat setara 	Cidera fisik dan mental berat	25 % < x < 50 % dari jam operasional layanan harian	75 % < x, 80 %
5	Sangat Signifikan	x > Rp 1M	> 10 permil	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kepercayaan stakeholder/investor sangat rendah - Tingkat kepuasan pengguna layanan < 3,5 (skala 5) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana > 5 tahun - Perdata > 100 M - Administrasi tergugat adalah Gubernur/Wagub 	Kematian	x > 50 % dari jam operasional layanan harian	x < 75 %

Kesimpulan level kriteria dampak

6. Matrik Analisis Resiko dan Level Resiko

* Kombinnasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukan besaran resiko

* Penuangan besaran Resiko dilakukan dalam Matriks Analisis Resiko untuk menentukan Level resiko

* Level kemungkinan terjadinya Resiko, Level Dampak dan Level Resiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level)

* Matriks Analisis Resiko dan Level Resiko di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tabel berikut :

Matriks Analisis Resiko			LEVEL DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Kesimpulan Besaran Resiko

LEVEL RESIKO		
Level Resiko	Besaran Resiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Orange
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Merah Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

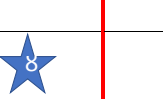
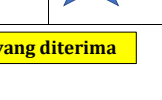
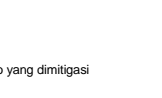
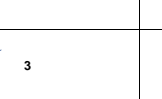
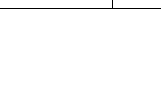
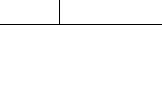
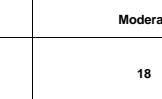
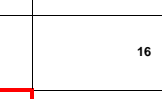
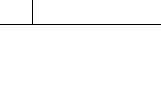

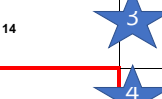
7. Selera Resiko

Matriks Analisis Resiko 5 x 5			Level Resiko				
			1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Kemungkinan Terjadinya Resiko	5	Hampir Pasti Terjadi	3	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang-kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Formulir Profil dan Peta Risiko
KECAMATAN KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2022

A.	Profil Risiko		IDENTIFIKASI RISIKO				ANALISIS						EVALUASI		
	Sasaran Organisasi	No.	Kejadian	Risiko		Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penegasan
				Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
1	Meningkatnya kepuasan pengelolaan Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi	1.1	Terlambatnya pembayaran honor FKDM	Keterlambatan penyerahan laporan FKDM Ke Kecamatan	Lambatnya penyerapan anggaran FKDM pada Kecamatan	Resiko Operasional	Memberikan teguran untuk memenuhi kewajiban memberikan laporan	1	Hampir Tidak Terjadi, Sangat Jarang < 2 kali dalam setahun	2	Minor, Gangguan Terhadap Layanan Operasional 5 % ≤ x < 15 % dari jam operasional harian	3	Biru, Sangat Rendah (1) 1-5	9	tidak
		1.2	Tidak maksimalnya Kegiatan Keagamaan	Adanya SE Menteri Agama dan Rekomendasi Inspektorat	Tidak terealisasinya anggaran makmin	Resiko Kebijakan	mengajukan usulan perubahan anggaran (pengembalian belanja makmin)	2	Jarang Terjadi, Jarang 2 kali s.d 5 kali dalam 1 tahun	1	Tidak Signifikan , Gangguan Terhadap Layanan Operasional x < 5 % dari jam operasional	11	Biru, Sangat Rendah (1) 1-5	10	tidak
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan kota di Kota Administrasi Jakarta Utara	2.1	Kurang maksimalnya service KDO	Terbatasnya bengkel resmi yang menerima pemeliharaan KDO yang sesuai harga di anggaran	Sulit mencari bengkel resmi yang dapat menerima pemeliharaan KDO sesuai harga di DPA	Resiko Operasional	Melakukan Pemeliharaan di bengkel yang tidak resmi yang memenuhi harga DPA	2	Jarang Terjadi, Jarang 2 kali s.d 5 kali dalam 1 tahun	4	Signifikan, Gangguan Terhadap Layanan Operasional 35 % ≤ x < 50 % dari operasional layanan harian	13	Kuning, Sedang (3) 12-15	5	ya
3	Meningkatnya Kepuasan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	3.1	Kondisi gedung kantor Kecamatan tidak nyaman dikarenakan bocorKondisi gedung kantor Kecamatan tidak nyaman (bocor, sebagian plafon rubuh)	Ketersediaan anggaran pemeliharaan gedung terbatas	Pelaksanaan kerja tidak nyaman, membahayakan.	Resiko Kebijakan	Mengajukan usulan pemeliharaan rehab berat ke tingkat Kota dan Koordinasi dengan Instansi terkait dengan Citata terkait Rekomtek	4	Sering Terjadi, Sering : 10 Kali s.d 12 kali dalam 1 tahun	5	Sangat Signifikan, Gangguan Terhadap Layanan Operasional 35 % ≤ x < 50 % dari jam operasional layanan kantor	24	Merah, Sangat Tinggi (5) 20-25	1	ya
		3.2	Minimnya Ketersediaan Peralatan Kantor yang memadai (Printer)	Printer yang ada kondisi rusak berat (tidak bisa di service) sedangkan Ketersediaan anggaran pembelian Printer terbatas	Pelaksanaan Tupoksi tidak berjalan efektif	Resiko Operasional	Mengajukan Usulan Penambahan Pagu Anggaran	4	Sering Terjadi, 10 % < x ≤ 50 %	4	Signifikan, Gangguan Terhadap Layanan Operasional 35 % ≤ x < 50 % dari jam operasional layanan harian	19	Orange, Tinggi (4) 16-19	2	ya
		3.3	Kondisi Lift Tidak Berfungsi Baik (Macet)	Ketersediaan anggaran pemeliharaan terbatas	Keamanan Pengguna Terganggu	Resiko Operasional	Mengajukan Usulan Penambahan Pagu Anggaran	4	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali dalam 1 tahun	4	Signifikan, Gangguan Terhadap Layanan Operasional 35 % ≤ x < 50 % dari jam operasional layanan harian	17	Orange, Tinggi (4) 16-19	2	ya
4	Meningkatnya kepuasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	4.1	Terjadinya gratifikasi dalam pelayanan	Kurangnya pemantauan/ monitor Pelayanan	Kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi	Resiko Kebijakan	SOP Pelayanan Publik	3	Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun	4	• Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional. • Tingkat kepercayaan stakeholder/investor rendah. • Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,5 < x ≤ 4 (skala 5).	17	Orange, Tinggi (4) 16-19	3	ya
5	Meningkatnya Kepuasan masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan kewenangan	5.1	Lamanya waktu penyelesaian pelayanan	Kurangnya pemantauan/ monitor Pelayanan	Kebutuhan pelayanan Masyarakat Tidak Tepat Waktu	Resiko Kebijakan	SOP Pelayanan Publik	3	Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun	4	• Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional. • Tingkat kepercayaan stakeholder/investor rendah. • Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,5 < x ≤ 4 (skala 5).	17	Orange, Tinggi (4) 16-19	3	ya
6	Meningkatnya kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pelimpahan Desa	6.2	Masih terdapat Bangunan Liar di Wilayah Kecamatan Kelapa Gading	Pengawasan yang tidak berjalan efektif	Wilayah tidak tertata dengan rapih dan kumuh	Resiko Kepatuhan	Membuat teguran, memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya ijin mendirikan bangunan	3	Kadang Terjadi, Kadang-Kadang Terjadi 10 % < x ≤ 20 %	2	Minor, Gangguan Terhadap Layanan Operasional 5 % ≤ 15 % dari jam operasional harian	10	Hijau, Rendah (2) 6-11	6	tidak

B. Peta Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5		Level Dampak					
		1	2	3	4	5	
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan	
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6 	12	16 	19 	24
	3	Kadang-kadang Terjadi	4 	10 	14 	17	22
	2	Jarang Terjadi	 12 	7	11 	13 	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1 	3	5	8	20

Area Risiko yang diterima

Area Risiko yang dimitigasi

- Keterangan
-  Prioritas Risiko ke-1 merah (1) area resiko yang dimitigasi
 -  Prioritas Risiko ke- 2 orange area yang dimitigasi
 -  Prioritas Risiko ke- 3 kuning area resiko yang dimitigasi
 -  Prioritas Risiko ke- 4 hijau area resiko yang diterima
 -  Prioritas Resiko ke- 5 biru area resiko yang diterima